

### **BAB III**

#### **BERDIRINYA ORGANISASI POETRI MARDIKA DI BATAVIA TAHUN 1912**

##### **3.1 Latar Belakang Terbentuknya Organisasi Poetri Mardika Di Batavia Tahun 1912**

Memasuki abad ke-20 atau yang sering dikatakan sebagai masa Kebangkitan Nasional, peranan perempuan pribumi di Hindia Belanda semakin banyak melakukan pergerakan, baik secara perseorangan maupun secara berkelompok. Alasan dikatakan sebagai masa Kebangkitan Nasional, karena perempuan pribumi tidak lagi mengandalkan kekuatan senjata dan pemberontakan, melainkan dalam bentuk organisasi yang terstruktur.<sup>1</sup> Pergerakan melalui organisasi dianggap sebagai suatu tindakan protes terhadap keadaan yang menimpa perempuan pribumi. Mereka menginginkan kesejahteraan atau kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan. Kemajuan memiliki makna sebagai upaya menghilangkan kepincangan yang telah menghambat hidupnya, sehingga dapat dimanfaatkan untuk meninggikan derajatnya dan mendapatkan perlakuan yang lebih baik dari keluarga, masyarakat, bahkan penjajah Belanda yang saat itu sedang berkuasa.<sup>2</sup>

Rentang tahun 1900-1975, pergerakan perempuan dibagi ke dalam beberapa periode dan mengalami banyak perkembangan dengan melihat keadaan dari perempuan pribumi, yaitu periode 1912-1928, periode 1928-1942, periode 1942-1945, periode 1945-1950, periode 1950-1959, periode

---

<sup>1</sup> Triana Wulandari, *Perempuan Dalam Gerakan Kebangsaan*. Jakarta: Kemendikbud, 2017, hlm. 54.

<sup>2</sup> Sukanti Suryochondro, 1984, hlm. 76.

1959-1966 dan periode 1966-1975. Setiap periode memiliki corak pergerakan dan tujuannya masing-masing, salah satunya adalah periode 1912-1928. Periode 1912-1928, difokuskan untuk menanamkan kesadaran berorganisasi yang mengusahakan kemajuan bagi perempuan pribumi dari bidang sosial dan bidang pendidikan. Prakarsa untuk membentuk organisasi perempuan timbul dari perempuan pribumi sendiri, terutama dari pendidik perempuan.<sup>3</sup> Perempuan pribumi tidak lagi berpuas diri akan keterbatasan yang diisi dengan kewajiban untuk keluarga dan rumah tangga saja.<sup>4</sup> Organisasi perempuan yang lahir pada periode 1912-1928, yaitu:

**Tabel 3.1**  
**Organisasi Perempuan Periode 1912-1928**

No.	Nama Organisasi	Tempat	Tahun Berdiri	Pemrakarsa
1.	Poetri Mardika	Batavia	1912	Budi Utomo
2.	Keoetamaan Isteri	Bandung	1913	Dewi Sartika
3.	Keradjinan Amal Setia	Minangkabau	1914	Rohana Kudus
4.	Wanita Hadi	Jepara	1915	-
5.	Pawijatan Wanita	Magelang	1915	-
6.	Poerborini	Tegal	1917	-
7.	PIKAT (Pertjintaan Ibu Kepada Anak Temoeroen)	Manado	1917	Maria Walanda Maramis
8.	Wanita Soesilo	Pemalang	1918	-
9.	Wanodjo Oetomo	Yogyakarta	1920	Sarekat Islam
10.	Gorontaloische Mohammedaanshe Vrouwenbeweging	Gorontalo	1920	-
11.	Sarekat Kaoem Ibu Soematera	Bukittinggi	1920	-
12.	Kemadjoean Isteri	Batavia dan Bogor	1926	-
13.	Mardi Kamoeliasan	Madiun	1927	-
14.	Ina Toeni	Ambon	1927	Sarekat Ambon

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 129.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 79.

15.	Poeteri Setia	Manado	1928	-
16.	Wanita Sahati	Batavia	1928	-

Sumber: Susan Blackburn, *Kongres Perempuan Pertama: Tinjauan Ulang.* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2007), hlm. 26.

Berdasarkan tabel di atas, organisasi perempuan pada periode 1912-1928, masih bersifat umum dan keanggotaannya bersifat sukarela. Setiap orang memiliki kebebasan untuk menjadi bagian dari keanggotaannya dengan cukup memenuhi beberapa ketentuan, seperti umur, kewarganegaraan dan menyetujui tujuan dari organisasi yang bersangkutan. Upaya untuk menanamkan kesadaran akan pentingnya kemajuan perempuan pribumi pun banyak dilakukan melalui rapat, propaganda dan surat kabar atau majalah, sehingga tidak heran jika sebagian besar dari organisasi perempuan yang lahir pada periode 1912-1928 memiliki surat kabarnya masing-masing. Keberadaan surat kabar banyak dimanfaatkan untuk memperkenalkan, menyebarkan keberadaan organisasi, tujuan dan berbagai pandangan tentang masalah sosial atau pendidikan yang dialami oleh perempuan pribumi.<sup>5</sup> Cara tersebut, dianggap lebih sesuai dengan cita-cita perikemanusiaan dan keadilan, daripada harus tunduk pada feodalisme yang membatasi pergaulan hidup perempuan pribumi.

Kesadaran untuk memajukan kehidupan perempuan pribumi juga timbul dari para elit muda terpelajar atau nasionalis yang mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan barat dan mereka tergabung dalam organisasi pemuda. Salah satu contoh dari banyaknya organisasi pemuda yang memberikan perhatian kepada perempuan pribumi, yaitu Budi

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 130.

Utomo. Budi Utomo merasa prihatin dengan buruknya keadaan sosial dan pendidikan dari perempuan pribumi, sehingga tergerak hatinya untuk ikut memperjuangkan hak perempuan pribumi.<sup>6</sup> Tanggal 3-5 Oktober 1908 di Yogyakarta, diadakan kongres pertama Budi Utomo dan dihadiri oleh tujuh cabang Budi Utomo yang tersebar di beberapa kota, seperti Bandung, Bogor, Batavia, Magelang, Yogyakarta, Surabaya dan Ponorogo. Budi Utomo cabang Yogyakarta mengajukan tiga pasal tentang beasiswa bagi orang Jawa-Madura, tata krama atau tata cara masyarakat Jawa sesuai dengan tingkat sosialnya dan pemilihan pengurus pusat.<sup>7</sup>

Pendapat dari Budi Utomo cabang Yogyakarta tersebut, mendapatkan respon baik dari Dr. Wahidin Sudirohusodo. Ia memiliki satu pemikiran dan menyetujui pasal yang pertama, namun menurut Budi Utomo cabang Batavia, ketiga masalah di atas belum mencerminkan tujuan Budi Utomo yang lebih luas. Budi Utomo cabang Batavia berkeinginan untuk menyampaikan pendapatnya dan mengajukan 15 masalah dengan satu pasalnya memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan perempuan pribumi. Pasal yang dimaksud, yaitu pasal enam dengan bunyi “pendidikan dan pengajaran bagi gadis dan wanita bumiputra”.<sup>8</sup> Budi Utomo cabang Batavia memiliki dua alasan krusial mengajukan pasal tersebut dan menjadi latar belakang berdirinya Poetri Mardika di Batavia tahun 1912.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 129.

<sup>7</sup> Akira Nagazumi, *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia: Budi Utomo 1908-1918*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989, hlm. 71.

<sup>8</sup> Abdurrachman Surjomihardjo, *Budi Utomo Cabang Betawi*. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1973, hlm. 41.

Alasan pertama, adat istiadat berlaku dalam pernikahan yang telah menyudutkan perempuan pribumi, sehingga tidak heran jika kedudukan mereka selalu berada di bawah laki-laki. Kebebasan yang seharusnya dirasakan oleh mereka tiba-tiba harus lenyap ketika mulai memasuki usia yang rentang banyak dilakukannya pernikahan, seperti usia dua belas tahun sampai lima belas tahun, sehingga perempuan pribumi akan semakin tertutup ruang geraknya, dikucilkan oleh dunia luar dan hanya dapat menerima apa yang selalu diperintahkan kepadanya. Mereka tidak memiliki kebebasan untuk menentukan tujuan hidupnya sendiri, karena pilihan mereka hanya fokus untuk menjadi istri, ibu dan ibu rumah tangga yang perannya akan selalu berada di sumur, dapur dan kamar.

Alasan kedua, peran perempuan pribumi yang marginal menjadi pendorong kuat bagi mereka untuk tidak diwajibkan mendapatkan kesempatan pendidikan. Asumsinya jika mereka bersekolah, maka usia pernikahannya harus ditunda dan mereka juga telah mengetahui kedudukan atau hukum dalam kehidupan rumah tangga, sehingga sulit ditemukan perempuan pribumi yang pergi ke sekolah untuk menuntut ilmu, begitupun dengan golongan bangsawan. Pendidikan sangat diprioritaskan untuk laki-laki, karena mereka dianggap memiliki pemikiran yang lebih baik dan lebih layak untuk melakukan pekerjaan. Perempuan pribumi hanya dijadikan sebagai pelengkap kehidupan, bahkan dijadikan budak yang harus tunduk terhadap perkataan suaminya, tanpa didengarkan kemauannya.

Pendidikan dianggap penting untuk membantu menghilangkan segala bentuk penderitaan pada perempuan pribumi, sebagai akibat dari kekangan adat istiadat dan kebijakan Politik Etis pemerintah Belanda yang tidak memberikan perhatian khusus pada pendidikan perempuan. Permasalahan tersebut, mengakibatkan banyak organisasi perempuan yang memulai pergerakannya dengan mendirikan sekolah perempuan dan memberikan dana pendidikan atau beasiswa sebagai jalan keluar dari permasalahan sosial perempuan pribumi.<sup>9</sup> Bentuk tindak lanjut dari pasal enam, tahun 1912 pengurus biasa Budi Utomo cabang Batavia, salah satunya M. Abdoel Rachman dan Sadikoen Tondokoesoemo ikut serta dalam mendirikan Poetri Mardika di Batavia, tepatnya di Weltevreden (sekarang dikenal sebagai daerah Gambir), sehingga sering dikatakan sebagai organisasi keputrian dari Budi Utomo.<sup>10</sup>

Tujuan keterlibatan Budi Utomo cabang Batavia, tidak lain untuk membantu beberapa perempuan pribumi terpelajar yang menjadi pemrakarsa berdirinya Poetri Mardika, yaitu Tengkoë Theresia Sabaroeddin, R. Ajoë Soetinah Djojopranoto dan Rr. Roekmini serta dapat terus mendorong perempuan pribumi lain yang duduk dalam kepengurusan ataupun keanggotaan Poetri Mardika, supaya lebih giat membantu perempuan pribumi untuk mendapatkan hak-haknya. Perlu diketahui terlebih dahulu, Tengkoë Theresia Sabaroeddin merupakan cucu dari seorang raja Pagarruyung dan termasuk orang yang ikut terlibat dalam pendirian Sekolah

---

<sup>9</sup> Sukanti Suryochondro, *op.cit.*, hlm. 130.

<sup>10</sup> Maman S. Mahayana, "Majalah Wanita Awal Abad ke-20: Corong Ide Emansipasi", *Wacana*, Vol. 5, No. 1, 2003, hlm. 60.

Kartini di Batavia pada 11 Januari 1914. Rekan dekatnya, R. Ajoe Soetinah Djopranoto merupakan seorang lulusan Sekolah Guru di Bandung yang mendapatkan tugas untuk menjadi seorang pendidik di Sekolah Kartini Batavia. Ia juga menjadi pendidik khusus bagi anak-anak anggota Budi Utomo cabang Batavia dan Rr. Roekmini merupakan seseorang lulusan HBS Batavia yang bekerja menjadi seorang pendidik di Sekolah Kartini Batavia.<sup>11</sup>

Poetri Mardika menjadi pelopor emansipasi perempuan melalui wadah organisasi yang dapat menginspirasi lahirnya organisasi perempuan lain. Poetri Mardika memiliki pandangan bahwa perkumpulan perempuan di Hindia Belanda tidak lain pergerakannya untuk menjunjung tinggi dan membangun bangsa yang sedang dikuasai oleh pemerintah Belanda. Upaya untuk menjunjung tinggi dan membangun bangsa tersebut, harus terlebih dahulu memajukan kehidupan perempuan pribumi, seperti membebaskannya dari belenggu adat istiadat pernikahan dan menentang larangan untuk berpendidikan. Semua bentuk ketimpangan yang dialami oleh perempuan pribumi, diyakini dapat menghambat kemajuan hidup dan kemajuan bangsanya sendiri. Perempuan pribumi akan menjadi ibu dan pendidik utama dalam keluarga yang dapat menurunkan generasi penerus bangsa, sehingga perempuan pribumi tidak hanya memiliki kewajiban dalam keluarga saja, namun memiliki peran andil dalam menyelamatkan bangsa.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 61.

<sup>12</sup> Poetri Mardika, No. 3, 1916, hlm. 32.

Istilah Poetri Mardika berasal dari dua kata, yaitu *poetri* berarti perempuan dan *mardika* berarti bebas atau merdeka.<sup>13</sup> Poetri Mardika memiliki makna perempuan yang bebas atau merdeka, bahkan perempuan yang sama sekali belum bebas atau merdeka, sehingga Poetri Mardika bertanggungjawab besar dalam memperjuangkan hak-hak perempuan pribumi yang dilihat dari masalah sosial dan masalah pendidikannya.<sup>14</sup> Kemardikaan sejati yang diperjuangkan oleh Poetri Mardika, yaitu sebuah ketercapaian atau kesempurnaan yang seluas-luasnya dalam kehidupan perempuan pribumi dengan mengangkat derajatnya, supaya lebih dihormati keberadaannya, namun tidak melupakan kodratnya sebagai seorang istri, ibu dan pengurus rumah tangga. Hak-hak perempuan pribumi yang diperjuangkan, perlu mendapat dukungan dari orang lain, termasuk laki-laki (peran ayah dan suami), karena perempuan pribumi tidak dapat berdiri sendiri, tanpa bantuan dari pihak lain.<sup>15</sup>

Peningkatan derajat perempuan pribumi ini merupakan salah satu tujuan utama dalam masalah kesejahteraan umum yang ingin dicapai oleh organisasi perempuan pada periode 1912-1928.<sup>16</sup> Organisasi perempuan pada periode tersebut, memiliki corak pergerakannya masing-masing yang dibagi menjadi dua. Corak pergerakan pertama, yaitu organisasi perempuan berasaskan agama, seperti Aisyiyah yang sangat memegang teguh ajaran agama Islam dan hanya ditujukan untuk perempuan pribumi beragama

---

<sup>13</sup> Nur Indah S. dan Coryy Liana, 2019, hlm. 6.

<sup>14</sup> Poetri Mardika, No. 5, 1915, hlm. 45.

<sup>15</sup> Poetri Mardika, No. 10, 1917, hlm. 100.

<sup>16</sup> Marwati Djoened. P. dan Nugroho N., 1984, hlm. 240.



Islam, sehingga pergerakannya melalui pengajian dan dakwah atau tabligh. Corak pergerakan kedua, yaitu organisasi perempuan yang tidak berasaskan agama, salah satunya Poetri Mardika. Poetri Mardika memilih bersikap adil atau tidak memihak salah satu agama, supaya pergerakannya lebih bebas dengan cara apapun, seperti propaganda di depan masyarakat luas dengan tetap menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama.

Poetri Mardika memiliki pandangan bahwa untuk mensejahterakan perempuan pribumi tidak perlu melihat latar belakang agama yang dianutnya. Kesejahteraan menjadi senjata menuju kehidupan yang lebih baik lagi, sehingga kesejahteraan menjadi hak yang harus didapatkan oleh semua perempuan pribumi dengan tidak memandang latar belakang agama yang dianut oleh perempuan pribumi, baik yang beragama Islam, Kristen, bahkan Kong Hu Chu.<sup>17</sup> Tersebarinya berbagai agama di Hindia Belanda, namun mayoritas masyarakatnya lebih banyak menganut agama Islam. Poetri Mardika memberikan perhatian yang dinilai unik bagi organisasi yang tidak berasaskan agama Islam, yaitu perlu diajarkannya pengetahuan agama Islam kepada para peserta didik yang sedang menempuh pendidikan di Sekolah Kartini Batavia dan harus disediakan pendidik khusus yang memiliki pengetahuan lebih tentang agama Islam.<sup>18</sup>

Poetri Mardika memiliki beberapa alasan pentingnya pengetahuan agama Islam di sekolah, yaitu untuk mengetahui perilaku yang baik dan buruk dihadapan agama Islam atau Tuhan, banyak orang tua yang tidak

---

<sup>17</sup> Poetri Mardika, No. 3, 1917, hlm. 29.

<sup>18</sup> Poetri Mardika, No.10, 1916, hlm. 103.

memiliki waktu untuk memberikan pengetahuan agama Islam, sulit ditemukan pendidik khusus agama Islam di lingkungan tempat tinggalnya (di luar kegiatan mengaji pada sore hari yang hanya belajar membaca koran atau kitab) dan apabila terdapat pendidik khusus agama Islam pun, orang tua harus mengeluarkan biaya tambahan sebagai imbalannya.<sup>19</sup> Kedua corak pergerakan organisasi perempuan di atas, baik berasaskan agama ataupun tidak berasaskan agama, tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu memperjuangkan kesejahteraan untuk menyempurnakan hidupnya dan mempertinggi derajat perempuan pribumi yang sering dipandang rendah.

Awal masa pendiriannya, perempuan pribumi di Batavia sempat memiliki anggapan bahwa Poetri Mardika hanya diperuntukkan bagi kaum bangsawan dan kaum terpelajar saja, karena kepengurusan Poetri Mardika dikelilingi oleh kaum yang memiliki kesempatan dalam memperoleh pendidikan, terutama pendidikan modern atau Barat, baik perempuan maupun laki-laki. Anggapan tersebut, tentunya dapat menghambat pergerakan dari Poetri Mardika sendiri, namun setelah mengetahui tujuan dari Poetri Mardika yang ingin memperjuangkan kemajuan bagi perempuan pribumi dalam bidang sosial dan bidang pendidikan, mereka mulai sadar jika Poetri Mardika sangat terbuka bagi semua golongan masyarakat pribumi dan dalam keanggotaannya pun melibatkan peran laki-laki. Laki-laki tidak hanya ikut andil pada awal pembentukan Poetri Mardika saja, melainkan terlibat juga dalam mempertahankan dan mendukung tujuan dari Poetri Mardika.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

Pergerakan organisasi perempuan dalam memperjuangkan kemajuan pada bidang sosial dan bidang pendidikan, secara penuh didukung oleh berbagai macam surat kabar perempuan. Keberadaan surat kabar digunakan sebagai media utama dalam memberikan gagasan kemajuan hidup dan menjadi sarana pendidikan serta pengajaran, sehingga dapat membentuk pandangan publik bahwa perlu adanya perbaikan nasib dan kedudukan sosial pada perempuan pribumi. Pemberian kesadaran akan hak dan kewajiban pada perempuan pribumi yang dilakukan melalui surat kabar, dianggap lebih baik dan lebih praktis, karena dapat dengan mudah diingat atau akan membekas dalam pikiran dan hatinya. Surat kabar dapat merangkul semua orang sampai ke berbagai penjuru Hindia Belanda, baik itu perempuan maupun laki-laki, tanpa melihat status sosial dan sistem adat atau budaya.<sup>20</sup>

Gagasan yang dipublikasikan dalam surat kabar menjadi sebuah bentuk aspirasi atau suara abadi yang tidak akan pernah hilang, selama surat kabarnya masih ada. Berbeda dengan suara lantang dari para pembicara ketika sedang menyampaikan gagasannya di lapangan yang akan hilang secara bersamaan dengan selesainya proses orasi. Perempuan pribumi yang dikenal sebagai makhluk paling lemah lembut, kemungkinan kecil tidak akan memilih menjadi seorang orator dalam menyampaikan gagasannya demi menyadarkan kaumnya dari berbagai ketimpangan adat istiadat. Mereka akan lebih memilih aksinya melalui tulisan dalam surat kabar, sehingga banyak organisasi perempuan yang mengeluarkan surat kabarnya

---

<sup>20</sup> Nur Urifatullailiyah dan Sri Mastuti M., "Pemikiran Pendidikan Perempuan Pribumi Jawa Dalam Pers Kolonial Tahun 1908-1928", *AVATARA*, Vol. 5, No. 1, 2017, hlm. 1484.

sendiri dan keduanya memiliki peran yang tidak dapat terpisahkan.<sup>21</sup> Organisasi perempuan pun menjadi cikal bakal lahirnya surat kabar ataupun sebaliknya, seperti keberadaan surat kabar Poetri Hindia yang dapat membentuk organisasi perempuan Poetri Hindia.<sup>22</sup>

Berbeda dengan Poetri Hindia, Poetri Mardika mengeluarkan surat kabar miliknya sendiri setelah organisasi Poetri Mardika terbentuk yang diberi nama Poetri Mardika, sesuai dengan nama organisasinya. Surat kabar Poetri Mardika diterbitkan tahun 1915-1920, tepatnya setiap pertengahan bulan (tanggal 15), sehingga sering dikatakan sebagai surat kabar bulanan yang diberikan kepada para anggotanya secara percuma. Perlu diketahui, tahun 1913, Poetri Mardika pernah mengeluarkan surat kabarnya yang diterbitkan setiap satu minggu sekali atau surat kabar mingguan, namun keberadaan fisik dari surat kabar mingguannya tidak ditemukan dan tidak diketahui gagasan-gagasan apa yang mereka gelorakan, sama halnya dengan surat kabar bulanan terbitan pertama tahun 1914. Surat kabar Poetri Mardika memiliki semboyan yang dicantumkan di halaman pertama setiap bulannya. Semboyan tersebut, yaitu “soerat kabar memperhatikan keadaannya pihak perempuan boemi poetra di Insulinde”.<sup>23</sup>

Berdasarkan semboynannya, surat kabar Poetri Mardika memberikan perhatiannya terhadap keadaan perempuan pribumi di Hindia Belanda yang ruang geraknya terkekang oleh adat istiadat, sehingga menjadi makhluk paling rendah di lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Maman S. Mahayana, *op.cit.*, hlm. 62.

<sup>23</sup> Cora Vreede de Stuers, 2017, hlm. 78.

Bagian dalam Surat kabar Poetri Mardika terdiri atas sembilan rubrik. Rubrik pertama, Warta Redaksi berisi informasi dari dewan redaksi yang membahas kegiatan redaksi dan organisasinya, seperti perubahan jumlah halaman yang dikeluarkan dalam surat kabarnya. Rubrik kedua, Warta Administrasi berisi seputar masalah administrasi dari organisasinya, seperti tagihan kepada para anggota yang telah menunggak pembayaran uang kas selama tiga bulan dan perubahan harga surat kabar. Rubrik ketiga, Pemandangan dikhususkan untuk memuat gagasan atau artikel tentang wacana emansipasi perempuan yang dilihat dari masalah perempuan pribumi dalam pernikahan dan pentingnya pendidikan bagi perempuan pribumi.

Rubrik keempat, Soerat Terboeka berisi tentang undangan dari organisasi yang ditujukan kepada para anggota atau pelanggan dan pemberitahuan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan, seperti undangan rapat anggota setiap tiga bulan sekali. Rubrik kelima, *Correspondent* berisi tentang surat dan pertanyaan dari para anggota atau pelanggan yang harus dijawab oleh dewan redaksi. Surat atau pertanyaan yang masuk tersebut, sebagian besar menggunakan bahasa Belanda. Rubrik keenam, Permohonan berisi tentang semua permintaan dari dewan redaksi kepada para anggota atau pelanggan, seperti bentuk perhatian pengurus jika terdapat anggota atau pelanggan yang pindah pekerjaan atau pindah rumah diharapkan untuk segera menghubunginya. Rubrik ketujuh, Pangarepan berisi tentang harapan dari para anggota atau pelanggan yang ditujukan kepada dewan redaksi, seperti harapan diterbitkannya tulisan berbahasa Jawa, karena tidak semua

masyarakat Hindia Belanda bisa menulis dan membaca bahasa Melayu, apalagi bahasa Belanda. Penggunaan bahasa Jawa menjadi pertimbangan berat, karena membutuhkan dana tambahan untuk menerbitkannya.

Rubrik kedelapan, Daftar Anggota berisi tentang semua daftar anggota masuk dan anggota keluar atau dikeluarkan dan dicantumkan juga kota asal serta alasan keluar atau dikeluarkannya. Rubrik kesembilan, Verslag berisi tentang laporan dari kegiatan yang telah dilaksanakan oleh organisasi dan biasanya dikeluarkan setiap tiga bulan sekali. Kehadiran surat kabar Poetri Mardika, dijadikan sebagai media utama dalam melakukan pergerakannya dan menjadi wadah untuk menampung semua aspirasi tentang prinsip-prinsip kemajuan pada perempuan pribumi atau wacana emansipasi perempuan, guna memupuk kesadaran para anggota dan pembaca lainnya. Wacana emansipasi perempuan yang digelorkan oleh Poetri Mardika lebih berfokus pada masalah sosial dalam pernikahan, karena menjadi masalah penting yang banyak menimpa perempuan pribumi, seperti pernikahan dini, kawin paksa, poligami dan praktik pernyiaan pada masa kolonial yang dapat berujung dengan dilakukannya pernikahan campuran.

Surat kabar Poetri Mardika juga memuat berbagai gagasan yang dapat memberikan kesadaran akan pentingnya perempuan pribumi dalam mendapatkan hak pendidikan formal, tidak hanya sampai lulusan Sekolah Rendah saja (sekarang setara dengan lulusan Sekolah Dasar). Kesempatan pendidikan yang diberikan kepada perempuan pribumi tersebut, dapat dimanfaatkan untuk meninggikan kedudukan sosialnya di lingkungan

keluarga maupun lingkungan masyarakat. Semua kepincangan dalam pernikahan dan larangan perempuan pribumi untuk mendapatkan kesempatan pendidikan formal ini, disebabkan oleh adat istiadat yang berlaku di Hindia Belanda, sehingga Poetri Mardika memberikan pemahamannya tentang adat istiadat. Poetri Mardika tidak memiliki maksud untuk menghapus semua adat istiadat, karena adat istiadat menjadi simbol warisan budaya dari para pendahulunya, hanya adat istiadat yang merugikan perempuan pribumi saja yang harus dihilangkan.

Semua artikel yang dimuat dalam surat kabar Poetri Mardika, terutama rubrik Pemandangan berasal dari para pengurus dan anggota atau pelanggan. Para anggota atau pelanggan, baik perempuan maupun laki-laki diberikan hak kebebasan untuk menyuarakan gagasannya tentang keadaan perempuan pribumi di lingkungan tempat tinggalnya. Penggunaan bahasa yang digunakan dalam surat kabar Poetri Mardika ada dua, yaitu bahasa Belanda untuk pelanggan dari Eropa dan bahasa Melayu untuk pelanggan dari Hindia Belanda. Tahun 1915 sampai Juli 1917, sebagian besar artikelnya menggunakan bahasa Melayu dan pimpinan dewan redaksinya dipegang oleh Sadikoen Tondokoesoemo yang dibantu oleh Asiah, Soetinah Djojopranoto dan Abdoel Rachman. Alamat redaksinya berada di Jalan Batu Tulis, Nomor 21, Weltevreden, sehingga anggota atau pelanggan yang ingin mengirimkan artikel dapat dikirimkan ke alamat tersebut.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Poetri Mardika, No. 5, 1916, hlm. 56.

Bulan Juli 1917, pimpinan dewan redaksi surat kabar dipecah menjadi dua kepengurusan. Tujuannya, supaya dewan redaksi memiliki tanggungjawab yang lebih terfokus pada satu bahasa saja. Kepengurusan pertama, yaitu artikel berbahasa Belanda dipegang oleh Asiah yang menjalin kerjasama dengan R. M. S. Soerya Ningrat di Belanda dan orang-orang terkemuka lainnya di Hindia Belanda. Alamat redaksinya pun tidak lagi di Jalan Batu Tulis, Nomor 21, melainkan pindah ke Gang Petodjo Pinatoe, Nomor 20, Weltevreden. Tahun 1918 sampai Mei 1920, kepemimpinan dewan redaksi artikel berbahasa Belanda dipegang oleh tiga orang, yaitu R. A. Siti Aisah, Abdoel Rachman dan Kadiroen serta alamat redaksinya ikut pindah ke Pegangsaan. Mereka juga menjalin kerjasama dengan R. M. S. Soerya Ningrat, R. A. Dewatyah, Noto Soeroto, Aurora dan R. Koemaraningrat. Kepengurusan kedua, yaitu mulai bulan Juli 1917 sampai penghabisan tahun 1917, artikel berbahasa Melayu dipegang oleh I. G. Tjiptorahardjo dan memiliki alamat redaksi sendiri, yaitu di Gang Kenari, Nomor 74, Weltevreden.<sup>25</sup>

Para anggota atau pelanggan yang ingin mengirimkan artikelnya, dapat dikirimkan ke alamatnya masing-masing, sesuai dengan bahasa yang digunakannya. Tahun 1918 sampai April 1920, surat kabar Poetri Mardika tidak lagi menerbitkan artikelnya dalam bahasa Melayu, sehingga semua lembaran surat kabarnya menggunakan bahasa Belanda yang sebagian besar berisi seputar organisasinya saja. Semboyan yang sering ditampilkan pada

---

<sup>25</sup> Maman S. Mahayana, *op.cit.*, hlm. 64.



lembaran pertama juga diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda, yaitu *Maanblad Gewijd Aan De Vrouwenbeweging In De Inlandsche Maatschappij*. Tahun 1920, Poetri Mardika pun mengeluarkan surat kabarnya dengan edisi *Extra Nummer* atau verslag besar yang dijadikan sebagai laporan penutup dan kesimpulan tentang seputar organisasinya, program dan capaian yang telah terlaksana selama tahun 1916-1919.<sup>26</sup>

Kehadiran laki-laki tidak hanya dari Budi Utomo cabang Batavia saja yang ikut andil dalam pembentukan Poetri Mardika, kepengurusan dan penerbitan surat kabarnya. Budi Utomo cabang Surakarta juga ikut andil dalam pencetakan surat kabar Poetri Mardika dari tahun 1915-1920, baik yang berbahasa Belanda maupun berbahasa Melayu. Surat kabar Poetri Mardika yang telah dicetak akan diterbitkan dan dikirimkan kepada alamat para anggota atau pelanggannya dengan syarat pembayaran surat kabar telah lunas yang dibayarkan di setiap awal tahun, sehingga dapat menjadi pelanggan selama satu tahun ke depan. Tahun 1915, harga surat kabar untuk semua pelanggan sebesar f 1. Tahun 1916-1917, mengalami kenaikan harga menjadi f 1.50 untuk semua pelanggan dan masih mengeluarkan dalam 12 halaman, sama dengan tahun 1915.<sup>27</sup> Tahun 1918-1920, harga surat kabar mengalami kenaikan kembali serta adanya perbedaan harga untuk pelanggan Hindia Belanda sebesar f 2 dan untuk pelanggan Eropa sebesar f 2.50.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, 65.

<sup>27</sup> Poetri Mardika, No. 4, 1916, hlm. 39.

<sup>28</sup> Poetri Mardika, No. 1, 1918, hlm. 8.

Kenaikan harga pada surat kabar Poetri Mardika tersebut, disebabkan oleh harga kertas yang semakin melonjak naik sampai 100%.<sup>29</sup> Kenaikan harga kertas ini berpengaruh juga pada berkurangnya jumlah halaman yang dicetak setiap bulan, dari 12 halaman menjadi delapan halaman. Jumlah halaman yang dicetak, baik 12 halaman maupun delapan halaman dibagi ke dalam dua bagian, yaitu enam halaman awal atau empat halaman awal, dikhususkan untuk artikel berbahasa Belanda dan sisanya untuk artikel berbahasa Melayu. Tahun 1918-1920, surat kabar Poetri Mardika mencetak delapan halaman di setiap bulannya yang secara keseluruhan menggunakan bahasa Belanda, karena kekurangan dana. Bulan Mei 1920, Poetri Mardika tidak lagi menerbitkan surat kabarnya, namun prestasi dalam menyebarkan wacana emansipasi perempuan telah membuahkan bukti nyata dengan munculnya surat kabar perempuan lain sebagai pengaruh positif dari surat kabar perempuan yang telah beredar sebelumnya.

### **3.2 Keanggotaan Organisasi Poetri Mardika Tahun 1915-1920**

Keanggotaan Poetri Mardika setiap bulannya sering terjadi keluar masuk anggota. Keanggotaannya terdiri dari perempuan dan laki-laki yang mendukung penuh gerakan emansipasi perempuan di Hindia Belanda. Anggota Poetri Mardika banyak berasal dari Pulau Jawa, seperti Batavia, Banten, Bandung, Buitenzorg, Purwakarta, Purworejo, Bojonegoro, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Madiun, Ngawi, Blitar dan lain-lain. Orang-orang Batavia menjadi salah satu dominasi dalam keanggotaan Poetri

---

<sup>29</sup> Poetri Mardika, No. 1, 1918, hlm. 7.

Mardika, karena letak organisasinya berada di kota tersebut. Orang-orang dari Sumatera, Maluku dan Kalimantan juga ikut menjadi bagian dari keanggotaannya, meskipun tidak sebanyak anggota dari Pulau Jawa atau masih dapat terhitung jumlahnya, seperti Palembang, Medan, Padang, Bangka Belitung, Balikpapan, Ternate dan lain-lain. Jumlah anggota Poetri Mardika dari tahun 1915-1920, yaitu:

**Tabel 3.2**  
**Jumlah Anggota Poetri Mardika Tahun 1915-1920**

No.	Tahun	Anggota Masuk	Anggota Keluar	Sisa Anggota	Selisih Anggota
1.	1915	-	-	161 orang	-
2.	1916	59 orang	36 orang	184 orang	(+) 23 orang
3.	1917	41 orang	46 orang	179 orang	(-) 5 orang
4.	1918	51 orang	75 orang	155 orang	(-) 24 orang
5.	1919	24 orang	57 orang	122 orang	(-) 33 orang
6.	1920	-	-	122 orang	Dibubarkan

Sumber: Verslag Tahoen 1916-1919, Poetri Mardika, Extra Nummer 1920, hlm. 2.

Berdasarkan tabel di atas, jumlah anggota Poetri Mardika tahun 1915-1916 mengalami penambahan sebanyak 23 orang dan dibuktikan dengan jumlah anggota yang masuk lebih besar daripada jumlah anggota yang keluar. Poetri Mardika telah berhasil mengajak masyarakat Hindia Belanda untuk ikut andil menjadi bagiannya dan membuktikan bahwa organisasinya telah tumbuh besar, terkenal, dan banyak diminati oleh masyarakat Hindia Belanda, sehingga cukup mudah dan mendapat banyak dukungan ketika sedang melakukan pergerakannya. Tahun 1917-1920 jumlah keanggotaan Poetri Mardika mengalami penurunan sedikit demi

sedikit sampai berkurang sangat drastis dan jumlah anggota yang keluar tidak sebanding atau lebih banyak daripada jumlah anggota yang masuk.

Mereka yang keluar dari keanggotaan Poetri Mardika memiliki dua kemungkinan. Pertama, mereka dikeluarkan secara terhormat oleh pengurus, karena anggotanya telah meninggal dunia atau keluar atas permintaan sendiri dengan menyertakan alasannya yang masuk akal, seperti pindah rumah atau keadaan ekonominya yang sedang tidak baik. Kedua, mereka dikeluarkan secara paksa dan tidak terhormat oleh pengurus, karena belum membayar tunggakan dalam bentuk uang kas bulanan. Mereka juga tidak mengirimkan surat keberatan untuk meminta tambahan waktu jatuh tempo pembayaran atau keinginan mencicil tunggakannya.<sup>30</sup> Pengurus akan langsung memberi peringatan melalui surat kabar Poetri Mardika untuk segera membayar atau mencicilnya dan jika telah lebih dari tiga bulan, mereka terpaksa dikeluarkan serta namanya disiarkan dalam surat kabar.<sup>31</sup>

Komunikasi antara pengurus dengan anggota sangat berjalan baik. Pengurus cenderung memberikan perhatiannya, seperti mengingatkan jika terdapat anggota atau pelanggan yang tidak menerima surat kabar dan anggota atau pelanggan yang pindah pekerjaan atau pindah rumah untuk segera menghubunginya dan memberikan alamat barunya, sehingga surat kabar Poetri Mardika dapat dikirimkan ke alamat baru.<sup>32</sup> Semua anggota atau pelanggan berhak menerima surat kabar tersebut, karena mereka telah menjadi pelanggannya dan telah membayar selama satu tahun penuh dengan

---

<sup>30</sup> Poetri Mardika, No. 8, 1915, hlm. 24.

<sup>31</sup> Poetri Mardika, No. 6, 1915, hlm. 66.

<sup>32</sup> Poetri Mardika, No. 4, 1915, hlm. 44.

pembayaran di awal muka atau awal tahun. Setiap tiga bulan sekali, pengurus sering mengadakan rapat dengan para anggota untuk sekedar menjaga hubungan baiknya. Rapat juga dimanfaatkan untuk mengevaluasi semua kegiatan yang sebelumnya telah dilaksanakan, meskipun tidak semua anggota hadir, karena berada di luar Batavia. Mereka tidak perlu khawatir, pengurus akan menyiarkan dalam surat kabar di bulan selanjutnya, supaya anggota yang tidak hadir dapat mengetahui hasil rapatnya.

### **3.3 Kepengurusan Organisasi Poetri Mardika Tahun 1915-1920**

Awal berdirinya Poetri Mardika, kepengurusan diketuai oleh seorang perempuan pribumi dari golongan elit terpelajar, yaitu R. A. Theresia Sabaruddin dan dibantu oleh R. Aj. Joyopranoto sebagai wakil ketua. Bulan Juli 1915, R. A. Theresia Sabaruddin mengundurkan diri dari jabatannya. Ia harus meninggalkan Batavia dan kembali ke kampung halamannya di Pagarruyung, Sumatera Barat, sehingga untuk sementara waktu R. Aj. Joyopranoto harus memegang dua jabatan sekaligus, yaitu sebagai ketua dan wakil ketua, sebelum jabatan ketua dipegang secara resmi oleh R. Nganten Asiah Koesrin pada tahun 1916 dan R. Ajoe Katidjah pada tahun 1918. Kepemimpinan R. A. Theresia Sabaruddin, telah memberikan jasa besar melalui pidato di hadapan masyarakat Buitenzorg dengan memberikan pandangan akan pentingnya memuliakan perempuan pribumi, sehingga dapat menambah kekuatan dari pergerakan Poetri Mardika.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Poetri Mardika, No. 8, 1915, hlm. 79-80.

Jabatan yang lain, yaitu sekretaris dan bendahara dipegang oleh Sadikoen Tondokoesoemo dan Rr. Roekmini yang kemudian digantikan oleh M. Moehamad. Jabatan administrasi dipegang oleh R. Aj. Noerbaiti Permansjah dan tahun 1918 diangkat menjadi bendahara, menggantikan M. Moehamad. R. Aj. Noerbaiti Permansjah merupakan istri dari Moehadjir, seorang anggota biasa dari Budi Utomo cabang Batavia. Bulan Oktober 1916 sampai Mei 1920, administrasi dipegang oleh M. Moehamad (ia merangkap menjadi bendahara sebelum R. Aj. Noerbaiti Permansjah menggantikannya), R. A. Djaeton, Soebisno dan Abdoel Rachman secara bergantian. Jabatan komisaris dipegang oleh beberapa orang, yaitu R. A. Djaetoen, M. Sastrodirono, Abdoel Rachman dan R. Tjokrodibroto.<sup>34</sup> Bersamaan dengan masa jabatannya, Abdoel Rahman sering pindah rumah ke luar kota, seperti Buitenzorg dan Cirebon serta M. Moehamad yang pindah rumah ke Lumajang, sehingga pekerjaannya terganggu serta harus dibantu oleh Sadikoen Tondokoesoemo dan Kadiroen, selaku orang kepercayaan.<sup>35</sup>

Tahun 1918, R. Aj. Joyopranoto mengalami musibah sampai ia harus pulang ke Purworejo dan tidak kembali lagi ke Batavia, karena suaminya sakit sampai meninggal dunia. Tahun yang sama juga, R. A. Djaeton yang merupakan saudara dari R. Aj. Joyopranoto meninggal dunia di usia mudanya. Musibah yang menimpa pengurus Poetri Mardika tersebut, tentunya beberapa jabatan pengurus, seperti wakil ketua dan komisaris

---

<sup>34</sup> Poetri Mardika, No. 5, 1916, hlm. 51.

<sup>35</sup> Poetri Mardika, Extra Nummer, 1920, hlm. 2.

mengalami kekosongan jabatan. Sadikoen Tondokoesoemo segera mengambil tindakan dengan mewartakan kepada anggotanya, bahwa Poetri Mardika sedang mencari pengurus baru untuk mengisi jabatan yang kosong, namun tidak ada satupun anggota yang berminat.<sup>36</sup> Pergantian pengurus, kekosongan jabatan dan merangkapnya jabatan dalam Poetri Mardika, dapat dikatakan sangat wajar terjadi dalam sebuah organisasi dan menandakan jika kepengurusannya sangat menyesuaikan dan di bawah kepemimpinan R. Ajoe Katidjah mampu bertahan sampai Poetri Mardika dibubarkan.

Setiap pengurus dan anggota memiliki kewajiban yang harus dipenuhi di setiap bulannya. Mereka harus membayar uang kas atau iuran yang nantinya akan dimanfaatkan untuk keperluan dan program Poetri Mardika, supaya semua tujuannya yang menginginkan kemajuan sosial dan pendidikan pada perempuan pribumi di Batavia, bahkan Hindia Belanda dapat tercapai. Pengurus akan mengirimkan wessel pos sebagai bentuk penagihan kas pada setiap awal bulan. Kas dari semua anggota tersebut, menjadi pemasukan dan sangat besar sekali pengaruhnya bagi perkembangan dan pergerakan Poetri Mardika, meskipun Poetri Mardika sering sekali mengalami kerugian. Pengurus harus menutupi kekurangannya dan jika terdapat anggota yang menunggak, maka akan menghambat semua program yang rutin dilaksanakan oleh Poetri Mardika dan memberatkan pengurus, karena harus mengeluarkan biaya tambahan. Perhitungan kas masuk dan kas keluar Poetri Mardika Tahun 1916-1919, yaitu:

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

**Tabel 3.3**  
**Perhitungan Kas Masuk Poetri Mardika Tahun 1916-1919**

No.	Tahun	Kas Masuk	Jumlah	Total
1.	1916	Pendapatan Contributie (Kontribusi)	f 660	f 722
		Pendapatan Abonnement (Pelanggan)	f 58	
		Pendapatan Darma	f 4	
2.	1917	Pendapatan Contributie (Kontribusi)	f 530	f 666
		Pendapatan Abonnement (Pelanggan)	f 106	
		Pendapatan Darma	f 30	
3.	1918	Pendapatan Contributie (Kontribusi)	f 574	f 695
		Pendapatan Abonnement (Pelanggan)	f 121	
4.	1919	Pendapatan Contributie (Kontribusi)	f 491	f 570
		Pendapatan Abonnement (Pelanggan)	f 71	
		Pendapatan Darma	f 8	
<b>Jumlah</b>				<b>f 2.653</b>
Sisa Kas Tahun 1915			f 162	f 162
<b>Total Keseluruhan</b>				<b>f 2.815</b>

Sumber: Verslag Tahoen 1916-1919, Poetri Mardika, Extra Nummer 1920, hlm. 5.

**Tabel 3.4**  
**Perhitungan Kas Keluar Poetri Mardika Tahun 1916-1919**

No.	Tahun	Kas Keluar	Jumlah	Total
1.	1916	Pembayaran Uang Sekolah dan Buku	f 244	f 712
		Pembayaran Onderstand (Kemanusiaan)	f 33	
		Pembayaran Orgaan (Organisasi)	f 319	
		Pembayaran Diversen (Tidak Terduga)	f 78	
		Pembayaran Pencetakan Verslag 1915 dan Statuta	f 38	
2.	1917	Pembayaran Uang Sekolah dan Buku	f 275	f 727
		Pembayaran Onderstand (Kemanusiaan)	f 30	
		Pembayaran Orgaan (Organisasi)	f 329	
		Pembayaran Diversen (Tidak	f 93	



		Terduga)		
3.	1918	Pembayaran Uang Sekolah dan Buku	f 243	f 745
		Pembayaran Orgaan (Organisasi)	f 381	
		Pembayaran Diversen (Tidak Terduga)	f 96	
		Pembayaran Kontribusi Untuk Kongres Pendidikan Hindia Belanda	f 25	
4.	1919	Pembayaran Uang Sekolah dan Buku	f 217	f 605
		Pembayaran Onderstand (Kemanusiaan)	f 9	
		Pembayaran Orgaan (Organisasi)	f 331	
		Pembayaran Diversen (Tidak Terduga)	f 48	
<b>Jumlah</b>				<b>f 2.789</b>
<b>Kas Masuk – Kas Keluar</b> <b>f 2.815 – f 2.789 = f 26</b>				
<b>Sisa Kas Untuk Tahun 1920 (Pemasukan)</b>				<b>f 26</b>

Sumber: Verslag Tahoen 1916-1919, Poetri Mardika, Extra Nummer 1920, hlm. 6.

Berdasarkan kedua tabel di atas, memperlihatkan bahwa pemasukan dan pengeluaran Poetri Mardika selama tahun 1916-1919 besaran jumlahnya tidak tetap. Poetri Mardika mendapatkan pemasukan dari hasil sumbangan para anggota yang mayoritasnya dari kalangan bangsawan. Nyonya-nyonya Belanda dan berbagai organisasi yang menjalin kerjasama dengannya, baik yang berasal dari Hindia Belanda maupun Belanda juga ikut memberikan sumbangan. Pemasukan Poetri Mardika tersebut, banyak didapat dari sumbangan dan menjadi pendapatan paling utama bagi organisasinya, sehingga merasa sangat terbantu. Pemasukan lain dari pembayaran pelanggan surat kabarnya, ikut andil dalam membantu keuangan Poetri Mardika, meskipun jumlahnya tidak sebesar dana sumbangan, apalagi jumlah dari pendapatan darma yang jauh sekali besaran jumlahnya.

Banyaknya pemasukan yang telah didapat oleh Poetri Mardika di setiap tahunnya, akan dimanfaatkan untuk melakukan pergerakannya.

Setiap tahun, Poetri Mardika rutin memberikan dana pendidikan atau beasiswa kepada anak-anak gadis yang orang tuanya tidak mampu menyekolahkan, sekaligus memberikan alat perlengkapan sekolah, seperti alat tulis, buku bacaan dan lain-lain. Keperluan organisasinya, seperti biaya administrasi atau sekretariat, biaya pencetakan surat kabar dan biaya tidak terduga juga menggunakan uang kasnya. Terbilang sebagai organisasi perempuan yang sangat memperhatikan keadaan sekitar, hampir setiap tahun Poetri Mardika mengeluarkan uang kasnya hanya untuk biaya kemanusiaan, seperti santunan kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan. Tahun 1918, Poetri Mardika juga memberikan donasi untuk pelaksanaan Kongres yang membahas pendidikan di Hindia Belanda. Semua hal tersebut, dilakukan oleh Poetri Mardika sebagai bentuk pergerakannya, meskipun tiga tahun terakhir harus mengalami kerugian. Biaya pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, sehingga pengurus harus menutupi biayanya dan sisa uang untuk tahun 1920 sangat sedikit atau bisa dikatakan bangkrut.